



KAJIAN
PAGU INDIKATIF
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

2023

MITRA KERJA KOMISI III



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN BETJEN DPR RI



**KAJIAN PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
TAHUN 2023 – MITRA KERJA KOMISI III**

**Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Penanggungjawab : Drs. Helmizar, M.E.
Ketua : Rendy Alvaro, S. Sos., M.E.**

Anggota :
**Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Tio Riyono, S.E.
Leo Iskandar, S.E.**

Tim Kreatif :
**Satrio Arga Effendi, S.E.
Nadya Ahda, S.E.
Leo Iskandar, S.E.
Orlando Raka Bestianta, S.E.
Fadila Puti Lenggo Geni, S.E., M.M.**

**Pusat Kajian Anggaran
Tahun 2022**



Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Anggaran

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku “Kajian Pagu Indikatif Kementerian Dan Lembaga 2023” yang disusun oleh Bidang Politik dan Keamanan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dapat terselesaikan.


Penyusunan buku ini sebagai wujud nyata dalam mendukung fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada siklus Pembicaraan Pendahuluan. Pada siklus ini, pemerintah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2023 pada tanggal 20 Mei 2022. Kemudian DPR RI menyelenggarakan rapat kerja komisi dengan mitra kerja yang dilaksanakan pada 2-10 Juni 2022. Rapat kerja tersebut dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA KL) yang kemudian disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dijadikan acuan.

Buku ini mengawali pembahasannya dengan memaparkan perkembangan pagu indikatif kementerian/lembaga TA 2023 dibandingkan dengan alokasi anggaran APBN TA 2022 serta analisisnya. Selanjutnya, buku ini juga membahas isu-isu strategis Kementerian/Lembaga yang perlu menjadi perhatian beserta catatan-catatan dari sisi akuntabilitasnya.

Bagian dalam buku ini membahas pagu indikatif mitra kerja Komisi III, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Demikianlah, buku “Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023” yang disusun dan disajikan oleh Bidang Politik dan Keamanan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Besar harapan saya, buku ini dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber informasi serta acuan oleh Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI pada komisi III dalam melaksanakan fungsi anggaran. Atas kekurangan dalam penyusunan buku ini, kami mengharapkan saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi substansi dan penyajian buku ini. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota AKD DPR RI yang terhormat.

Jakarta, Juni 2022
Kepala Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI

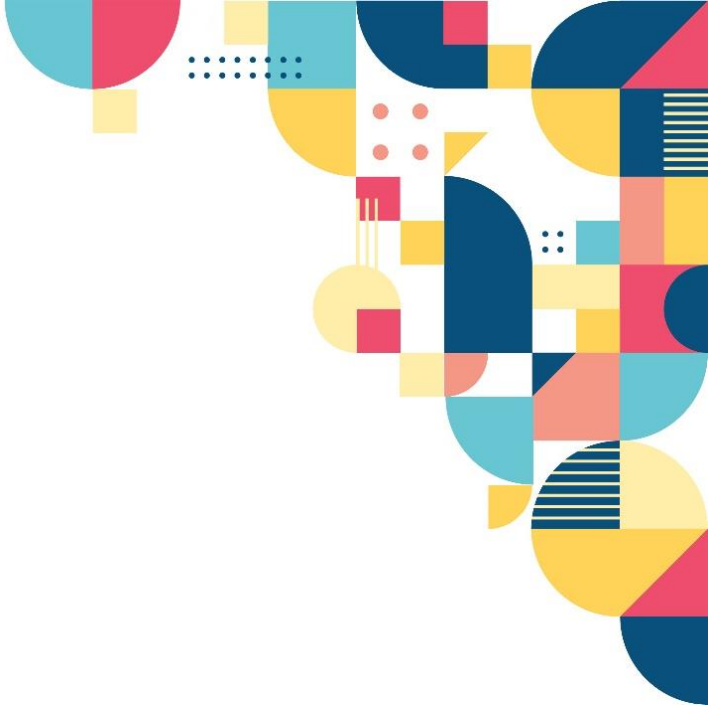

Drs. Helmizar, M.E.
196407191991031001



Daftar isi



Kata Pengantar.....	iii
Pagu Indikatif BNPT	1
Pagu Indikatif Kejaksaan RI	5
Pagu Indikatif Kemenkumham	9
Pagu Indikatif Komnas HAM	13
Pagu Indikatif Polri	17



KOMISI III





PAGU INDIKATIF BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) TAHUN 2023

Realisasi Anggaran BNPT pada tahun 2016 meningkat tajam lebih dari 2 (dua) kali lipat menjadi Rp650,6 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran BNPT mencapai pagu tertinggi pada 2017 sebesar Rp715,9 miliar. Di tahun-tahun setelahnya anggaran BNPT mengalami tren menurun, hingga pada pagu indikatif tahun anggaran 2023 menurun sebesar 5,4% dibandingkan APBN TA 2022.

Dalam pagu indikatif BNPT, dukungan manajemen mengalami peningkatan sebesar 15,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun justru pada program penanggulangan terorisme menurun hingga 19,6%. Ini menunjukkan masih lemahnya dukungan anggaran pemerintah terhadap pemberantasan terorisme.

Tabel 1. Pagu Indikatif BNPT

K/L	KEMPPKF 2022	APBN 2022 & KEM PPKF 2023		
		APBN 2022	KEMPPKF 2023	% Perubahan
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	453,9	453,9	429,2	-5,4%
a. Program Dukungan Manajemen	149,8	181,8	210,4	15,7%
b. Program Penanggulangan Terorisme	304,0	272,0	218,8	-19,6%

Sumber: KEM PPKF 2022, KEM PPKF 2023, APBN 2022

Isu Strategis BNPT Tahun 2023

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi terhadap pelaksanaan penanganan terorisme yang dilakukan oleh BNPT, diantaranya ialah hasil survei potensi radikalisme yang dirilis BNPT sebaiknya tidak dijadikan acuan satu-satunya dalam penanganan terorisme. Perlu diperhatikan hasil survei yang dirilis oleh BNPT tersebut didapat fakta bahwa indeks potensi radikalisme menurun dari 55,12 (2017) menjadi 14 (2020) namun berbanding terbalik dengan *Global Terrorism Index* yang justru meningkat dari 4,886 (2017) menjadi 5,384 (2020) dan 5,500 (2021). Sebagaimana diketahui bahwa *Global Terrorism Index* mengukur suatu kejadian berdasarkan kasus yang sudah terjadi. Artinya, tingkat potensi radikalisme yang menurun tajam belum tentu berkaitan erat dengan penurunan potensi terjadinya tindakan terorisme. Diperlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari Pemerintah. Penggunaan teknologi dapat menjadikan penyebaran doktrin lepas dari pantauan dalam survei yang dilakukan BNPT.

Selain itu juga pada tahun 2022, terdapat program BNPT berupa pelibatan secara terpadu K/L pada pelaksanaan program penanggulangan terorisme yang dilaksanakan hanya di lima wilayah, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lima daerah dinilai kurang tepat, apalagi di era modern saat ini penyebaran doktrin menggunakan teknologi internet yang tidak mengenal batas wilayah.

Catatan Akuntabilitas di BNPT

Opini Laporan Keuangan BNPT tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya bahwa laporan keuangan BNPT telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kinerja BNPT sangat dibutuhkan saat ini ketika radikalisme dan terorisme berdampak negatif pada lini kehidupan masyarakat. Namun, ada beberapa permasalahan yang terjadi di dalam pengelolaan anggaran BNPT. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK diungkap adanya kelemahan pengendalian

intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan:

- a. Kesalahan dalam perencanaan penggunaan Mata Anggaran Belanja Kegiatan tahun 2020.
- b. Kelebihan pembayaran honorarium narasumber dan pembayaran biaya transpor pegawai.

Oleh karena itu, sesuai dengan rekomendasi BPK atas permasalahan tersebut di atas, maka BNPT perlu lebih cermat dalam melakukan penyusunan rencana dan menguji pembayaran dan mengendalikan pelaksanaan Belanja Jasa Profesi dan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.



PAGU INDIKATIF KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

Di tahun anggaran 2023, pagu indikatif Kejaksaan RI menurun sebesar 4,7% dibandingkan APBN TA 2022. Sebelumnya, pada APBN TA 2022, Kejaksaan berhasil memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp3 triliun. Hal tersebut karena Kejaksaan memiliki struktur organisasi baru Jaksa Agung Muda Pidana Militer sesuai dengan Perpres 15 Tahun 2021.

Tabel.1 Pagu Indikatif Kejaksaan RI

K/L	KEMPPKF 2022	APBN 2022 & KEM PPKF 2023		
		APBN 2022	KEMPPKF 2023	% Perubahan
KEJAKSAAN AGUNG	6.864,0	10.110,0	9.632,2	4,7%
a. Program Dukungan Manajemen	6.391,4	9.490,2	9.110,9	4,0%
b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	472,6	619,8	521,2	5,9%

Sumber: KEM PPKF 2022, KEM PPKF 2023, APBN 2022

Isu Strategis Kejaksaan RI Tahun 2023

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, diantaranya:

Kejaksaan dalam Mendukung Reformasi Birokrasi

Dalam KEM & PPKF 2023 dijelaskan bahwa reformasi birokrasi pada tahap ketiga (2020-2024) bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendorong percepatan pembangunan nasional

ditandai dengan: (1) tidak adanya korupsi; (2) pengelolaan APBN/APBD yang efektif dan efisien; (3) proses perizinan yang cepat dan tepat; (4) komunikasi publik yang baik; (5) penggunaan jam kerja yang efektif dan produktif; dan (6) mekanisme *reward* dan *punishment* yang terimplementasi secara konsisten, berkelanjutan, serta memberikan hasil pembangunan yang nyata.

Menurut Indikator (2022), kepercayaan publik terhadap Kejaksaan sangat tinggi, yaitu berada di urutan ke-4 setelah TNI, Presiden, dan Polri. Jika dilihat dari kinerja, ICW (2022) mengungkapkan bahwa sepanjang 2021, kinerja Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan Kepolisian dan KPK. Secara internal juga Kejaksaan menunjukkan kinerja sangat baik dibuktikan dengan capaian kinerja sasaran strategis pada 2021, antara lain: 1) persentase aparat Kejaksaan yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian sebesar 140,75% dari target, 2) SAKIP Kejaksaan sebesar 163,66%, 3) Maturitas SPIP mencapai 100%, 4) persentase berkurangnya dumas terhadap aparatur Kejaksaan mencapai 150,16%, 5) terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang diukur dari persentase kegiatan yang mendukung mencapai 368%, 6) penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi mencapai 106,67%, serta 7) penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana mencapai 107,22% dan melalui jalur perdata mencapai 93,8%. Artinya, prestasi Kejaksaan tersebut tentu akan mendukung reformasi birokrasi. Untuk itu, prestasi Kejaksaan tersebut harus dijaga dan ditingkatkan bersama dengan aparat penegak hukum lainnya.

Melanjutkan *Restorative Justice*

Semenjak Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, Kejaksaan telah menghentikan lebih dari 823 penuntutan perkara tindak pidana umum berdasarkan keadilan restoratif. Pelaksanaan *restorative justice* sudah semakin diperkuat dengan disahkannya UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal tersebut akan sangat membantu memberikan rasa keadilan

pada aspek hukum serta dapat meringankan *overcrowded* pada Lapas/Rutan. Namun sangat disayangkan apabila tahun 2023 pagu anggaran Kejaksaan menurun sebesar 4,7%. Harapannya agar Kejaksaan dapat konsisten melanjutkan capaian terbaiknya yang telah diraih selama ini.

Catatan Akuntabilitas di Kejaksaan RI

Opini Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya bahwa laporan keuangan Kejaksaan RI telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan prestasi Kejaksaan yang sebagaimana disebutkan sebelumnya, Kejaksaan juga perlu memperhatikan tata kelola anggarannya. Beberapa diantaranya ialah terkait pengelolaan PNBP sebagaimana hasil temuan BPK yang termuat dalam IHPS I 2021 bahwa terdapat pengelolaan PNBP dari denda dan biaya perkara tilang pada beberapa kejaksaan negeri di Jawa Barat dan Sumatera Selatan belum tertib, di antaranya: (1) piutang tilang verstek yang telah kadaluarsa belum dihapuskan; (2) kelebihan uang titipan tilang pada Rekening Tilang Nasional 3 (RTN 3) yang belum diambil pelanggaran dan telah berumur lebih dari satu tahun belum disetor ke kas negara; dan (3) Barang bukti tilang verstek berupa kendaraan bermotor yang ditiptikan kepada Kepolisian Resort sebanyak 255 unit belum diketahui keberadaannya.

Oleh karena itu, sesuai dengan rekomendasi BPK atas permasalahan tersebut di atas, maka Kejaksaan perlu meningkatkan pemantauan piutang tilang yang telah kadaluarsa, pelimpahan RTN 3 untuk disetor ke kas negara, serta meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan tilang dan penitipan barang bukti kendaraan bermotor.

Selain itu, berdasarkan IHPS II 2021, terdapat penyelesaian atas barang bukti berstatus *inkracht* berupa uang titipan perkara belum tuntas (berlarut-larut sebesar Rp131,65 miliar dan USD 113,300.00, sehingga

berpotensi penyalahgunaan dari titipan uang perkara yang belum jelas upaya penyelesaiannya.

Oleh karena itu, sesuai dengan rekomendasi BPK terhadap permasalahan tersebut di atas maka Kejaksaan perlu:

- a. Meningkatkan transparansi pengelolaan/penyimpanan barang bukti dan barang rampasan negara melalui sistem informasi/aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi utama yang telah dibangun pada Kejaksaan RI.
- b. Menyusun perjanjian kerja sama antara Kejaksaan RI dengan POLRI mengenai tata cara pengajuan balik nama/registrasi kendaraan bermotor yang berasal dari barang rampasan negara berdasarkan hasil pelelangan dan/atau penjualan langsung.
- c. Menetapkan SOP/Pedoman secara baku yang mengatur mekanisme pengelolaan uang titipan perkara.

BLOK TAHANAN

PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (KEMENKUMHAM) TAHUN 2023

Di tahun anggaran 2023, pagu indikatif Kemenkumham meningkat sebesar 5,9% dibandingkan APBN TA 2022. Kenaikan ini diharapkan dapat mendukung kebijakan di tahun 2023 serta perlu juga memperhatikan dukungan Kemenkumham dalam mengatasi atau mengurangi *overcrowded* Lapas/Rutan yang selalu menjadi perbincangan beberapa tahun terakhir ini.

Tabel.1 Pagu Indikatif Kemenkumham

K/L	KEMPPKF 2022	APBN 2022 & KEM PPKF 2023		
		APBN 2022	KEMPPKF 2023	% Perubahan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	17.021,7	17.463,5	18.487,3	5,9%
a. Program Dukungan Manajemen	12.484,1	12.484,1	13.783,3	10,4%
b. Program Pembentukan Regulasi	29,9	36,1	38,4	6,4%
c. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	4.490,6	4.646,2	4.647,5	0,0%
d. Program Pemajuan dan Penegakan HAM	17,0	17,0	18,1	6,5%

Sumber: KEM PPKF 2022, KEM PPKF 2023, APBN 2022

Isu Strategis Kemenkumham Tahun 2023

PNBP fungsional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) utamanya berasal dari tiga unit yakni Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kinerja PNBP Kemenkumham periode 2017-2021 menunjukkan rata-rata pertumbuhan 2,36 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 (23,91 persen) dan terendah tahun 2020 (-33,45 persen) akibat pandemi Covid-19. Realisasi PNBP

Kemenkumham tahun 2022 hingga triwulan I-2022 mencapai Rp0,92 triliun.

Beberapa upaya telah dilakukan selama periode 2017-2021 antara lain:

- a. Penyelesaian *backlog* pada permohonan Paten, Merek, Hak Cipta dan Desain Industri;
- b. Optimalisasi layanan permohonan Merek Internasional;
- c. Perbaikan kualitas pelayanan, tata kelola, dan tarif bidang keimigrasian;
- d. Pengembangan layanan pada program AHU berbasis TIK;
- e. Pengembangan layanan Simpadhu (Sistem Pembayaran PNBP Administrasi Hukum Umum);
- f. Peningkatan kerja sama dengan lembaga/institusi pemerintah dan nonpemerintah penerapan pelayanan berbasis *online*.

Kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2023, antara lain:

- a. Optimalisasi PNBP melalui perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP;
- b. Optimalisasi layanan *visa on arrival* bagi wisatawan mancanegara, penyediaan paspor elektronik, dan penjamin keimigrasian;
- c. Pengembangan layanan berbasis TIK melalui penerapan layanan *online* dan perbaikan sarana dan prasarana teknologi;
- d. Optimalisasi Layanan Apostille pada Kantor Wilayah Kemenkumham serta Implementasi Sistem e-APP di Indonesia;
- e. Perluasan kerja sama penggunaan data antar K/L;

- f. Peningkatan kemudahan pembayaran PNBPN;
- g. Persetujuan Otomatis Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual (POP HKI) terkait layanan bersifat non-substantif dan sertifikasi ISO 9001 untuk paten, merek, dan desain industri; dan
- h. Peluncuran layanan klinik kekayaan intelektual/*mobile IP Clinic* dan program *Intellectual Property (IP) market place*.

Selain itu, Kemenkumham perlu memprioritaskan perbaikan Kualitas Pelayanan Lapas/Rutan, karena faktanya bahwa:

- a. Masih terjadi *overcrowded*, data Mei menunjukkan hingga 208%.
- b. Kualitas non makanan menurun.

Data menunjukkan bahwa biaya non makanan periode tahun 2012-2021 hanya meningkat 74,48%. Angka tersebut di bawah peningkatan biaya non makanan secara umum dalam periode yang sama sebesar 83,47% (BPS, 2021).

- c. Belum cukup pemenuhan kebutuhan biologis penghuni lapas/rutan yang sudah menikah.

Pareke (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penyimpangan seks yang terjadi di lembaga permasyarakatan sudah dalam tahap yang sangat memprihatinkan. Salah satu upaya mengatasi hal tersebut ialah dengan kebijakan *conjugal visit*. Sampai saat ini, Indonesia baru memiliki 3 (tiga) bilik asmara di lapas Ciangir, Kendal, dan Nusa Kambangan.

Catatan Akuntabilitas di Kemenkumham

Opini Laporan Keuangan Kemenkumham tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya bahwa laporan keuangan Kemenkumham telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam rangka mengoptimalkan kebijakan pada 2023, Kemenkumham perlu juga memperhatikan temuan BPK yang termuat dalam IHPS I 2021. Terdapat beberapa permasalahan di dalam pengelolaan anggaran Kemenkumham yang perlu mendapat perhatian, salah satunya ialah realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada empat Eselon-I Kemenkumham belum sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran sebesar Rp7,77 miliar serta belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp26,30 juta.

Selain itu, berdasarkan IHPS II 2021, terdapat realisasi belanja sewa pada dua kanwil (Sumbar dan NTB) dan empat Kanim (Kanim Kelas I TPI Jakarta Utara, Kanim Kelas I TPI Padang, Kanim Kelas II Non TPI Agam dan Kanim Kelas III Non TPI Bima) tidak memperhatikan aspek ekonomis dan memboroskan keuangan negara.

Oleh karena itu, sesuai dengan rekomendasi BPK terhadap permasalahan tersebut di atas, Kemenkumham perlu mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan yang belum dikenakan serta mengoptimalkan pengelolaan belanja sewa agar menjadi lebih baik.



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RUANG PENGADUAN

PAGU INDIKATIF KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) TAHUN 2023

Di tahun anggaran 2023, pagu indikatif Komnas HAM meningkat 8,2% dibandingkan APBN TA 2022. Namun program dukungan manajemen meningkat 12,9% sedangkan program penegakan dan pelayanan hukum menurun 3,6%.

Tabel.1 Pagu Indikatif Komnas HAM

K/L	KEMPPKF 2022	APBN 2022 & KEM PPKF 2023		
		APBN 2022	KEMPPKF 2023	% Perubahan
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	99,4	99,4	107,6	8,2%
a. Program Dukungan Manajemen	73,3	71,5	80,7	12,9%
b. Program Pemajuan dan Penegakan HAM	26,1	27,9	26,9	3,6%

Sumber: KEM PPKF 2022, KEM PPKF 2023, APBN 2022

Isu Strategis Komnas HAM Tahun 2023

Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024

Berdasarkan Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024, program Komnas HAM yang ditargetkan selesai pada tahun 2023 ialah pembuatan 4 (empat) peraturan Komnas HAM tentang Standar Norma dan Pengaturan (Perkom SNP). Peraturan ini akan digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kewajiban, sektor swasta (*private sector*) dan setiap individu yang ada di wilayah Indonesia untuk menjalankan penikmatan, kebebasan, dan batasan HAM.

Anggaran Meningkat Namun Pemajuan dan Penegakan HAM Menurun

Peningkatan anggaran Komnas HAM sangat diperlukan, khususnya dalam meningkatkan kapasitas SDM dan ruang kerja yang memadai. Pada 2021, Komnas HAM menyampaikan aspirasi mengenai ruang kerja yang kurang kondusif, termasuk bagi Komnas Perempuan. Untuk itu kenaikan pagu indikatif 2023 perlu dimanfaatkan dengan optimal. Namun, sangat disayangkan apabila program yang terkait dengan pemajuan dan penegakan HAM mengalami penurunan. Ini perlu juga menjadi catatan, karena jika melihat kinerja penyerapan program tersebut pada 2021 masih cukup baik, yaitu 94,74% untuk Komnas HAM dan 93,05% untuk Komnas Perempuan.

Komnas HAM masih dihadapkan dengan berbagai isu HAM yang perlu diakomodir. Sebagaimana disampaikan Komnas HAM dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada awal Januari lalu bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Komnas HAM meningkat dari 62% (2019) menjadi 73%(2021). Peningkatan kepercayaan tersebut juga seiring dengan peningkatan aduan masyarakat, yaitu dari 2425 berkas (2019) menjadi 2905 berkas (2021). Bahkan per Mei 2022 sudah masuk sebanyak 1203 berkas. Artinya, program Pemajuan dan Penegakan HAM perlu ditingkatkan sehingga laporan aduan masyarakat dapat menurun menandai penurunan isu terkait HAM.

Catatan Akuntabilitas di Komnas HAM

Opini Laporan Keuangan Komnas HAM tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya bahwa laporan keuangan Komnas HAM telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan meningkatnya pagu indikatif program dukungan manajemen sebesar 12,9% (KEM PPKF 2023), maka Komnas HAM perlu memastikan peningkatan SDM di lingkup Komnas HAM. Salah satu caranya ialah dengan memperhatikan temuan BPK sebagaimana termuat

dalam IHPS I 2020. BPK dalam laporan hasil pemeriksaannya mengungkapkan beberapa permasalahan terkait SDM antara lain:

- a. Pengendalian terhadap laporan kehadiran PNS pada masa Pandemi Covid-19 dan Laporan Capaian Kinerja pada Sistem Aplikasi Hadir belum optimal, dimana terdapat permasalahan berupa laporan capaian kinerja WFH pegawai tidak diotorisasi dan aplikasi hadir belum dapat menghasilkan informasi/data yang optimal.
- b. Ketidakcermatan dalam penyusunan kontrak atau surat perikatan kerja, dimana terdapat 2 (dua) pengadaan barang dan jasa yang tidak memasukkan hal-hal penting berkaitan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa meliputi perbedaan ruang lingkup pekerjaan pada surat perjanjian dengan dokumen penawaran dan pengadaan perencanaan renovasi gedung pola Komisi Nasional Perempuan.

Oleh karena itu, sesuai rekomendasi BPK atas permasalahan tersebut di atas, maka Komnas HAM perlu :

- a. Lebih optimal di dalam melakukan penilaian kinerja, pemantauan dan pengawasan untuk memastikan kedisiplinan pegawai dalam pembuatan laporan WFH pegawai masa *new normal*.
- b. Memperbaiki Aplikasi Sistem Kehadiran *Online* pada Aplikasi Hadir supaya bisa menghasilkan *output* yang lebih lengkap dan akurat.
- c. Lebih cermat dalam merancang kontrak.
- d. Melakukan reviu pekerjaan perencanaan renovasi Gedung Pola Komisi Nasional Perempuan, khususnya terkait biaya non personil dan kontrak.



PAGU INDIKATIF KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) TAHUN 2023

Pagu Indikatif Polri TA 2023 adalah sebesar Rp95,10 triliun, menurun sebesar 14,3% dibandingkan APBN TA 2022. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan bidang pertahanan dan keamanan, melalui pelaksanaan program antara lain:

- a. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri,
- b. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,
- c. Program Profesionalisme SDM Polri,
- d. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, dan
- e. Program Dukungan Manajemen.

Tabel 1. Pagu Indikatif Polri

K/L	KEMPPKF 2022	APBN 2022 & KEM PPKF 2023		
		APBN 2022	KEMPPKF 2023	% Perubahan
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	97.524,0	111.024,0	95.100,3	-14,3%
a. Program Dukungan Manajemen	49.873,9	49.873,9	49.490,0	-0,8%
b. Program Profesionalisme SDM Polri	2.444,1	2.808,8	2.803,3	-0,2%
c. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	5.498,7	5.527,1	5.599,7	1,3%
d. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	22.648,7	36.304,2	19.563,1	-46,1%
e. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	17.058,5	17.125,4	17.644,3	3,0%

Sumber: KEM PPKF 2022, KEM PPKF 2023, APBN 2022

Pada tahun 2022, target *output* prioritas Polri antara lain:

- a. Pemenuhan almatsus sebanyak 53.408 unit;
- b. Penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum sebanyak 87.778 kasus;
- c. Penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba sebanyak 20.979 kasus;
- d. Penanganan dan penyelesaian tindak pidana terorisme sebanyak 30 kasus; dan
- e. Layanan pengendalian operasi kepolisian sebanyak 12.154 operasi.

Adapun beberapa target *output* prioritas Polri pada tahun 2023 antara lain:

- a. Pemenuhan almatsus sebanyak 53.408 unit;
- b. Penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum sebanyak 87.778 kasus;
- c. Penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba sebanyak 20.979 kasus;
- d. Penanganan dan penyelesaian tindak pidana terorisme sebanyak 30 kasus; dan
- e. Layanan pengendalian operasi kepolisian sebanyak 12.154 operasi.

Isu Strategis Polri Tahun 2023

Beberapa hal yang ditekankan dan perlu menjadi perhatian dalam program reformasi birokrasi diantaranya:

Mitigasi Gangguan Keamanan Menjelang Pemilu 2024

Sebagaimana diketahui bahwa pada 2024 mendatang, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi. Dimana baru kali pertama dilakukannya Pemilu serentak yaitu pemilihan presiden/wakil presiden, pemilihan legislatif, serta pilkada dalam satu tahun yang sama. Pada masa pra-pemilu potensi gangguan keamanan mungkin saja terjadi yang perlu diantisipasi (Christianingrum et al., 2021). Antisipasi tersebut harus tercermin dalam

dukungan anggaran pada APBN TA 2023 mendatang. Harapannya ke depan pesta demokrasi dapat berjalan sesuai harapan pemerintah.

Pengelolaan PNB

Kepolisian merupakan penyumbang PNB terbesar kedua. Sebagai sumber utama PNB Kepolisian, sudah sepantasnya dilakukan perbaikan kualitas layanan SIM, STNK, STCK, BPKB, TNKB, uji keterampilan mengemudi serta penegakkan hukum, sehingga realisasi PNB dapat dilakukan secara optimal.

Peranan Polri Dalam Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendorong percepatan pembangunan nasional. *Governance* yang berkualitas mampu menghasilkan *development outcomes* yang baik pula dengan ditandai: (1) tidak adanya korupsi; (2) pengelolaan APBN/APBD yang efektif dan efisien; (3) proses perizinan yang cepat dan tepat; (4) komunikasi publik yang baik; (5) penggunaan jam kerja yang efektif dan produktif; dan (6) mekanisme *reward* dan *punishment* yang terimplementasi secara konsisten, berkelanjutan, serta memberikan hasil pembangunan yang nyata.

Pemerintahan yang dijalankan baik pusat maupun daerah belum bebas dari korupsi. Polri sebagai salah satu aparat penegakan hukum tindak pidana korupsi perlu turut mengoptimalkan kebijakan reformasi birokrasi pemerintah harus terus dilakukan guna menekan potensi korupsi yang terjadi, khususnya sektor pemerintahan. Diharapkan dengan terbebasnya pemerintahan dari korupsi, terkhusus aparat penegak hukum, *good governance* dapat tercapai.

